LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator 1: Keuntungan Relatif *(Relative Advantage)*

Mengukur sejauh mana inovasi ini dinilai lebih baik, lebih menguntungkan, atau memberikan nilai tambah dibandingkan dengan kondisi/program sebelumnya.

1. Latar Belakang & Nilai Tambah: Apa yang menjadi urgensi utama DPMD Kabupaten Mojokerto dalam meluncurkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa ini? Apa nilai lebihnya jika dibandingkan dengan program pemberdayaan desa konvensional yang sudah ada sebelumnya?
2. Dampak Kesejahteraan: Bagaimana program ini secara nyata mampu menekan angka kemiskinan ekstrem di pedesaan Kabupaten Mojokerto? Apakah ada indikator capaian yang menunjukkan peningkatan produktivitas kerja perangkat atau pekerja desa setelah adanya program ini?
3. Insentif & Keberlanjutan: Bagaimana Bapak/Ibu melihat keuntungan finansial maupun non-finansial jangka panjang bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan adanya program perlindungan ini?

Indikator 2: Kesesuaian *(Compatibility)*

Mengukur sejauh mana inovasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, kebutuhan lokal, serta regulasi yang berlaku.

4. Kesesuaian Regulasi & Visi Daerah: Bagaimana program ini berkesesuaian dengan visi-misi Bupati Mojokerto serta regulasi di atasnya (seperti instruksi presiden terkait optimalisasi Jamsostek)?
5. Kesesuaian Budaya & Kebutuhan Desa: Masyarakat desa seringkali memiliki resistensi terhadap asuransi atau jaminan formal. Bagaimana DPMD menyelaraskan program ini dengan karakteristik, budaya, dan kebutuhan riil para pekerja di ekosistem desa Kabupaten Mojokerto?
6. Integrasi Sistem: Apakah pelaksanaan program ini mengalami benturan atau justru berjalan selaras dengan sistem penganggaran APBD maupun APBDesa yang sudah berjalan selama ini?

Indikator 3: Kerumitan *(Complexity)*

Mengukur tingkat kesulitan yang dirasakan dalam memahami, mengimplementasikan, dan mengelola inovasi tersebut.

7. Hambatan Administrasi & Birokrasi: Di awal penerapannya, apa saja kerumitan atau kendala teknis terbesar yang dihadapi oleh DPMD, baik dalam hal pendataan pekerja ekosistem desa maupun koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan?
8. Kapasitas SDM Desa: Seberapa mudah program ini dipahami dan dijalankan oleh para aparatur desa selaku pelaksana di lapangan? Apakah ada keluhan terkait rumitnya sistem pelaporan atau mekanisme klaim?
9. Strategi Simplifikasi: Strategi atau regulasi turunan apa yang dikeluarkan oleh DPMD untuk menyederhanakan kerumitan aturan/prosedur tersebut agar lebih mudah diadopsi oleh seluruh desa?

Indikator 4: Kemungkinan Dicoba *(Triability)*

Mengukur sejauh mana inovasi ini dapat diuji coba terlebih dahulu dalam skala kecil sebelum diadopsi secara massal secara penuh.

10. Proyek Percontohan (*Pilot Project*): Sebelum diwajibkan secara menyeluruh di Kabupaten Mojokerto, apakah DPMD melakukan uji coba (*pilot project*) terlebih dahulu di beberapa desa atau kecamatan tertentu? Jika ya, bagaimana hasilnya?
11. Mekanisme Evaluasi Bertahap: Bagaimana proses transisi atau pematangan program ini dilakukan dari tahap perencanaan hingga akhirnya menjadi kebijakan yang mengikat secara massal di ekosistem desa?
12. Fleksibilitas Anggaran: Apakah dalam proses uji coba tersebut desa-desa diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan porsi anggaran APBDesa secara bertahap untuk jaminan sosial ini?

Indikator 5: Kemudahan Diamati *(Observability)*

Mengukur sejauh mana hasil atau dampak dari inovasi tersebut dapat dilihat secara nyata oleh pihak lain (desa lain, masyarakat, atau daerah lain), sehingga memicu adopsi yang lebih luas.

13. Transparansi & Bukti Nyata: Ketika ada pekerja desa yang mengalami risiko kerja (kecelakaan/kematian) dan menerima manfaat klaim, bagaimana DPMD mengemas momentum tersebut agar dampaknya bisa "terlihat nyata" oleh desa-desa lain yang belum optimal mengadopsi program ini?
14. Diseminasi Informasi: Media atau saluran komunikasi apa yang paling efektif digunakan DPMD untuk memperlihatkan keberhasilan program ini kepada publik dan aparatur desa?
15. Dampak Nasional / *Local Government Innovation*: Apakah inovasi dari Kabupaten Mojokerto ini sudah mulai dilirik, diamati, atau direplikasi oleh

pemerintah daerah lain di Jawa Timur atau tingkat nasional? Bagaimana dampaknya terhadap reputasi inovasi daerah Kabupaten Mojokerto?

2. Kepala BPJS Kabupaten Mojokerto Cabang Mojokerto

Indikator 1: Keuntungan Relatif *(Relative Advantage)*

Melihat nilai tambah inovasi ini bagi perluasan kepesertaan BPJS-TK dan manfaat langsung yang dirasakan ekosistem desa dibanding sebelum adanya kolaborasi dengan Pemkab.

1. Akselerasi Kepesertaan: Sebelum adanya inovasi kebijakan dari Pemkab Mojokerto ini, seberapa sulit BPJS Ketenagakerjaan menyasar pekerja di ekosistem desa? Apakah kebijakan *local government* ini memberikan lonjakan (keuntungan) signifikan terhadap cakupan kepesertaan (*coverage share*) di Mojokerto?
2. Perlindungan Riil: Apa saja bentuk keuntungan atau manfaat konkret (seperti JKM, JKK) yang sudah disalurkan kepada pekerja ekosistem desa di Mojokerto sejak program ini berjalan? Bagaimana dampak klaim tersebut terhadap ketahanan ekonomi keluarga di desa?
3. Efisiensi Skema: Mengapa skema kemitraan lewat inovasi daerah ini dinilai lebih menguntungkan dan efektif dibandingkan dengan pendekatan sosialisasi mandiri (konvensional) yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya?

Indikator 2: Kesesuaian *(Compatibility)*

Mengukur keselarasan program dengan sistem operasional BPJS-TK, regulasi nasional, serta pemahaman/kebutuhan masyarakat desa.

4. Harmonisasi Regulasi: Bagaimana inovasi perlindungan pekerja desa di Kabupaten Mojokerto ini menyatu dengan regulasi makro yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan (misalnya Inpres No. 2 Tahun 2021)? Apakah ada penyesuaian regulasi internal di tingkat cabang untuk menyambut inovasi daerah ini?
5. Kesesuaian Profil Pekerja Desa: Karakteristik pekerja ekosistem desa (BPD, RT/RW, Linmas, pekerja rentan desa) sangat dinamis dan berbeda dengan pekerja kantoran/pabrik. Bagaimana BPJS-TK Mojokerto menyesuaikan sistemnya agar "cocok" dengan profil, pola kerja, dan kemampuan finansial ekosistem desa tersebut?

Indikator 3: Kerumitan *(Complexity)*

Mengukur hambatan teknis, kerumitan birokrasi, administrasi pendaftaran, penagihan iuran, hingga proses klaim di lapangan.

6. Kendala Administratif Awal: Dalam proses adopsi inovasi ini, apa saja kerumitan teknis terbesar yang dihadapi BPJS-TK Mojokerto? (Misalnya: masalah sinkronisasi data NIK pekerja desa, kendala validasi data, atau keterlambatan pembayaran iuran dari anggaran desa).
7. Penyederhanaan Sistem (*Simplification*): Langkah-langkah atau terobosan apa yang dilakukan oleh BPJS-TK Cabang Mojokerto untuk memangkas kerumitan birokrasi tersebut agar pihak desa (perangkat desa/pengelola anggaran) mudah mendaftarkan dan membayar iuran anggotanya?
8. Aksesibilitas Klaim: Seberapa rumit proses pengajuan klaim bagi masyarakat desa yang mengalami risiko kerja? Apakah ada kanal khusus atau kemudahan prosedur yang diberikan sebagai bagian dari inovasi pelayanan ini?

Indikator 4: Kemungkinan Dicoba *(Triability)*

Melihat bagaimana BPJS-TK melakukan pengujian skema, piloting, atau simulasi sebelum program ini diimplementasikan secara massal ke seluruh desa di Mojokerto.

9. Fase *Piloting* / Uji Coba: Selama masa awal perancangan inovasi ini bersama Pemkab Mojokerto, apakah sempat dilakukan uji coba pemrosesan data dan iuran pada beberapa desa percontohan terlebih dahulu? Masukan teknis apa yang didapat dari fase uji coba tersebut?
10. Formulasi Skema Iuran: Bagaimana BPJS-TK memformulasikan skema penganggaran iuran (misal lewat Alokasi Dana Desa atau bagi hasil) agar saat diterapkan secara massal, desa-desa tidak kaget atau mengalami kegagalan bayar di tengah jalan?

Indikator 5: Kemudahan Diamati *(Observability)*

Mengukur sejauh mana keberhasilan program ini dapat dilihat wujudnya secara nyata oleh masyarakat, desa lain, maupun instansi BPJS Ketenagakerjaan di wilayah lain.

11. Dampak yang Terlihat (*Visible Impact*): Pemberian santunan secara simbolis sering dilakukan bersama Bupati. Seberapa besar penyerahan santunan yang "terlihat nyata" oleh publik ini mampu menggerakkan kesadaran desa-desa lain di Mojokerto untuk segera mempercepat adopsi program?
12. Indikator Keberhasilan Digital/Data: Apakah peningkatan jumlah kepesertaan dari ekosistem desa di Mojokerto ini dapat dipantau secara transparan (misal melalui *dashboard* data)? Bagaimana pihak BPJS-TK mendiseminasi data keberhasilan ini kepada Pemkab sebagai bahan evaluasi?
13. Model Percontohan Nasional: Apakah kerja sama inovatif dengan Pemkab Mojokerto ini sudah dijadikan *role model* atau bahan studi banding bagi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah lain?

3. Pekerja Ekosistem Desa (RT, RW, BPD, LPM, Karang Taruna)
Indikator 1: Keuntungan Relatif *(Relative Advantage)*

Menilai apakah program jaminan sosial ini dirasa memberikan manfaat, rasa aman, dan nilai tambah yang lebih baik dibanding sebelum ada program.

1. Rasa Aman Bekerja: Sejak Bapak/Ibu/Rekan-rekan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab/Pemerintah Desa, apakah ada perubahan pada rasa aman dan ketenangan saat menjalankan tugas melayani masyarakat desa?
2. Nilai Tambah Insentif: Tugas sebagai pengurus RT/RW/BPD/LPM/Karang Taruna biasanya bersifat pengabdian dengan insentif yang terbatas. Apakah perlindungan jaminan sosial ini dirasa sebagai bentuk penghargaan (keuntungan non-finansial) yang berharga dari pemerintah?
3. Perbandingan Kondisi: Sebelum ada program inovasi ini, apa yang biasanya terjadi jika ada pengurus RT/RW atau anggota Karang Taruna yang mengalami kecelakaan saat gotong royong atau bertugas di desa? Apakah program ini jauh lebih membantu?

Indikator 2: Kesesuaian *(Compatibility)*

Mengukur apakah inovasi ini sesuai dengan kebutuhan riil mereka, sejalan dengan beban kerja di desa, dan pas dengan kebiasaan masyarakat desa.

4. Kesesuaian dengan Risiko Kerja: Apakah risiko pekerjaan yang Bapak/Ibu hadapi sehari-hari di desa (misalnya: RT/RW yang harus keluar malam mengurus warga, Karang Taruna saat buat acara, Linmas saat jaga keamanan) dirasa cocok dan membutuhkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini?
5. Penerimaan Budaya: Di masyarakat desa, asuransi kadang dianggap tabu atau kurang akrab. Bagaimana awalnya Bapak/Ibu memandang program ini? Apakah sempat ada penolakan atau keraguan di internal lembaga desa?
6. [Khusus BPD] Kesesuaian Anggaran: Sebagai badan yang menyetujui anggaran desa, bagaimana BPD melihat kesesuaian alokasi anggaran APBDesa untuk membayar iuran ini? Apakah pengalihan anggaran tersebut dirasa sudah pas dan sesuai prioritas desa?

Indikator 3: Kerumitan *(Complexity)*

Mengukur tingkat kesulitan atau kemudahan dalam memahami program, proses pendaftaran/pendataan, hingga prosedur klaim manfaat.

7. Pemahaman Program: Seberapa mudah Bapak/Ibu memahami hak dan kewajiban dalam program ini (misalnya tahu apa saja yang ditanggung,

berapa besaran santunan, dsb)? Apakah sosialisasi dari DPMD/BPJS-TK atau Pemerintah Desa mudah dimengerti?

8. Kerumitan Administrasi: Bagaimana proses pengumpulan berkas (KTP, KK, data diri) saat awal pendaftaran? Apakah ada kendala atau dirasa berbelit-belit?
9. Pengalaman Pengurusan Klaim: Apakah di desa ini sudah pernah ada pengurus atau warga ekosistem desa yang mencoba melakukan klaim (karena kecelakaan kerja atau kematian)? Jika ya, seberapa rumit prosedurnya menurut pengamatan Bapak/Ibu?

Indikator 4: Kemungkinan Dicoba *(Triability)*

Melihat respon mereka terhadap skema kepesertaan bertahap atau masa-masa awal penerapan program di desa.

10. Respon Awal Penerapan: Saat program ini pertama kali disosialisasikan atau "diuji coba" diterapkan di desa ini, bagaimana respon awal dari rekan-rekan pengurus? Apakah langsung menerima atau ingin melihat perkembangannya dulu?
11. Keberlanjutan Pendaftaran: Apakah pendaftaran dilakukan serentak untuk semua lembaga desa, atau dilakukan secara bertahap (misalnya perangkat desa dulu, lalu BPD, baru kemudian RT/RW dan Karang Taruna)?

Indikator 5: Kemudahan Diamati *(Observability)*

Mengukur sejauh mana dampak konkret program ini bisa dilihat mata kepala sendiri oleh pengurus lembaga dan warga desa lainnya.

12. Bukti Nyata Penyembuhan/Santunan: Apakah Bapak/Ibu pernah melihat langsung ada rekan sejawat (sesama RT/RW/BPD/Karang Taruna) yang menerima manfaat nyata dari BPJS-TK ini (misal biaya rumah sakitnya gratis karena kecelakaan kerja, atau keluarganya dapat santunan kematian)?
13. Efek Domino Penyadaran: Setelah melihat bukti nyata tersebut, apakah pengurus lembaga lain atau masyarakat umum di desa menjadi lebih sadar dan tertarik untuk mendaftar secara mandiri?
14. Kebanggaan atas Inovasi Daerah: Bagaimana pandangan Bapak/Ibu ketika mengetahui bahwa Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu daerah yang berkomitmen memberikan inovasi perlindungan ini bagi pekerja ekosistem desa? Apakah ini memicu kebanggaan atau motivasi lebih dalam mengabdi?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara









Lampiran 3. Turnitin

TESIS WAHYU PRIYO UTOMO_1162500013.docx

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	7%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	5%
2	ejournal.sagita.or.id Internet Source	1%
3	voi.id Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	theacehpost.com Internet Source	1%
6	bappeda.sumenepkab.go.id Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
8	aksiologi.org Internet Source	<1%
9	www.scilit.net Internet Source	<1%
10	www.gramedia.com Internet Source	<1%
11	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1%
12	www.bpjsketenagakerjaan.go.id Internet Source	<1%
13	repository.uir.ac.id Internet Source	<1%
14	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1%